

PEMANFAATAN HASIL PENELITIAN YANG DILAKSANAKAN TAHUN 2011-2015

NO	JUDUL PENELITIAN	TAHUN	RINGKASAN REKOMENDASI	SKPD/LEMBAGA/KELP.PEMAMFAAT	KET		REALISASI (INVESTASI) Rp
					SUDAH	BELUM	
1	Kaji tindak penerapan formula makanan tambahan pada balita gizi kurang berbasis makanan lokal di Kabupaten Tanah Datar.	2011	- Upaya pemamfaatan PMT berbasis pangan lokal untuk balita gizi kurang perlu diintegrasikan dengan upaya pembangunan dan kesehatan lain yang berbeda pada unit-unit pemerintahan daerah dan departemen terkait seperti program pemberdayaan masyarakat, peningkatan ketahanan pangan rumah tangga, peningkatan produksi pertanian, revitalisasi posyandu dan program promosi kesehatan. - PMT berbasis pangan lokal perlu dilaksanakan melalui kegiatan posyandu dengan mengintensifkan keterlibatan unsur-unsur masyarakat dalam organisasi posyandu seperti PKK, Bundo kanduang, kader dan ibu balita. - Pelaksanaan PMT berbasis pangan lokal perlu dikembangkan melalui program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) - Perlu ditingkatkan koordinasi lintas sektor dan lintas program dalam pembinaan PMT berbasis pangan lokal melalui pertemuan lintas sektor dan lintas program, sehingga dapat membantu kelangsungan	- Dinas kesehatan, Puskesmas limo Kaum, Nagari Baringin Kabupaten Tanah Datar. - Kelompok pemamfaat kader Posyandu, PKK, Ibu yang mempunyai balita. - Terbentuknya organisasi masyarakat (in formal) yang menindaklanjuti penerapan pemberian makanan tambahan berbasis pangan lokal melalui swadaya masyarakat.	✓		Target 210.000.000 Realisasi 198.434.012

NO	JUDUL PENELITIAN	TAHUN	RINGKASAN REKOMENDASI	SKPD/LEMBAGA/KELP.PEMAMFAAT	KET		REALISASI (INVESTASI) Rp
					SUDAH	BELUM	
			program dimasa yang akan datang. - Diperlukan upaya pembinaan untuk menjadikan posyandu menjadi kelompok masyarakat yang memiliki usaha produktif yang memproduksi makanan berbasis sumberdaya lokal dengan target konsumen anak-anak. Disamping itu juga perlu upaya pemberdayaan masyarakat untuk berperan serta dalam memproduksi makanan tambahan berbasis pangan lokal. - Diperlukan dukungan pemerintah untuk mengimplementasikan PMT berbasis pangan lokal sebagai alternatif program PMT yang sudah ada. - Mengintensifkan upaya advokasi dan promosi PMT berbasis makanan lokal sebagai antisipasi dampak negatif peredaran makanan ringan yang miskin zat gizi yang dapat membawa perubahan perilaku konsumsi makanan anak balita kearah yang kurang baik. - Perlu upaya pembinaan dan pendampingan masyarakat dalam mengembangkan berbagai jenis bahan makanan lokal menjadi berbagai				

NO	JUDUL PENELITIAN	TAHUN	RINGKASAN REKOMENDASI	SKPD/LEMBAGA/KELP.PEMAMFAAT	KET		REALISASI (INVESTASI) Rp
					SUDAH	BELUM	
			macam bentuk makanan olahan yang dapat dimanfaatkan dalam PMT berbasis pangan lokal.				
2	Kajian pelaksanaan kebijakan satu petani satu sapi	2011	- Pendekatan menerapkan SPSS adalah melalui upaya mendorong potensi usaha sesuai dengan pengalaman,kelembagaan dan usaha yang telah ada ditengah-tengah masyarakat, kokritnya ialah mencari jalan keluar masalah yang tengah dihadapi petani. Misalnya, pada akses modal menyusun dua skim / paket ; (a) pinjaman modal syarat lunak, seperti ‘Sistem Penampung’ dan (b) mengukuhkan ‘Sistem persediaan/ bagi hasil. Untuk aplikasi kebijakan ini, Pemerintah Provinsi mengusahakan kerjasama dengan Bank Nagari, BUMN, dan perantau serta investor guna menyediakan modalnya. - Solusi masalah lain adalah melalui upaya lebih mendinamiskan aktivitas semua SKPD terkait. Sebab, rencana aksi umumnya berada dalam ranah tupoksi SKPD tersebut. Mestinya, secara kelembagaan memang perlu sinergi dengan pihak swasta dan kelompok petani peternak. Ada tiga	Dinas Pertanian, Dinas Peternakan dan sekretariat GPP.	✓		Target 160.000.000 Rea lisasi 157.122.060

NO	JUDUL PENELITIAN	TAHUN	RINGKASAN REKOMENDASI	SKPD/LEMBAGA/KELP.PEMAMFAAT	KET		REALISASI (INVESTASI) Rp
					SUDAH	BELUM	
			tahap untuk meraih tujuan SPSS, yaitu ; (a) belajar menjadi efektif, (b) efisien dan (c) perluasan. - Dalam melaksanakan SPSS perlu kegiatan pendampingan teknis dan administrasi kelembagaan. Misalnya , penyuluhan dan pelatihan buat petani /peternak penerima program,seperti: tentang pakan, kesehatan hewan, sanitasi kandang, manajemen pemeliharaan ternak dan kinerja kelompok. Rencana aksi untuk semua rekomendasi ini tercantum pada bagian tujuh, khususnya Tabel 7.2. Sedangkan mekanisme kerja akses permodalan tercantum pada lampiran (buku hasil penelitian)				
3	Kajian penerapan alih teknologi pertanian terpadu berkonsep Biocycle Farming (BCF) dalam rangka mendukung swasembadaya pangan dan peningkatan pendapatan	2011	- Peningkatan kapasitas IPTEK petani dan penyuluh tentang teknologi pengolahan limbah guna percepatan pengembangan Sistem Usaha tani Terpadu berkonsep BCF. - Optimasi pemamfaatan sumberdaya pertanian yang dimiliki petani (lahan dan tenaga kerja) dan penataan kombinasi komoditas menuju pola usaha tani Terpadu yang optimal berkonsep BCF dengan pendekatan LEISIA atau tanpa limbah (<i>zero</i>	- Dinas pertanian tanaman Pangan dan Perkebunan. - Dinas peternakan - Kelompok tani - Kelompok Saiyo di Simarasok Kecamatan Baso - Kelompok peternak sapi Kotohilalang di Kecamatan IV Angkat Candung - Kelompok tani di Simpang Empat Pasaman Barat.	✓		Target 215.000.000 Realisasi 212.376.566

NO	JUDUL PENELITIAN	TAHUN	RINGKASAN REKOMENDASI	SKPD/LEMBAGA/KELP.PEMAMFAAT	KET		REALISASI (INVESTASI) Rp
					SUDAH	BELUM	
	petani		waste). - Mengarahkan prioritas pembiayaan yang ada di nagari seperti LKM-A, koperasi, KMN dan LKM lainnya untuk pengembangan ternak, serta mendorong pemamfaatan KUR,KUPS oleh masyarakat tani/peternak.				
4	Studi pengembangan dan peningkatan kualitas objek wisata Sumatera Barat.	2012	- Melengkapi atau membangun infrastruktur pendukung daya tarik objek wisata yang bertaraf turis,baiik lokal maupun mancanegara. - Optimalisasi pengelolaan kawasan wisata dengan mengembangkan partisipasi masyarakat lokal dan pelaku wisata lainnya. - Menyediakan insentif bagi investasi swasta dalam penyediaan fasilitas pendukung kegiatan wisata dengan melakukan regulasi aturan daerah, khususnya yang menyangkut kepariwisataan. - Meningkatkan daya tarik wisata melalui pengembangan event-event wisata serta membentuk paket wisata. - Kajian untuk menjadikan Kota Tambang Sawahlunto sebagai Warisan Dunia ke UNESCO - Menjadikan Mentawai sebagai salah satu icon daerah unik dengan budaya	Kota (Padang, Bukittinggi, Sawalunto), Kabupaten Padang Pariaman, Agam, 50 kota, Tanah Datar, Solok, Pesisir Selatan, Kep. Mentawai.		✓	Target 188.000.000 Realisasi 172.847.940

NO	JUDUL PENELITIAN	TAHUN	RINGKASAN REKOMENDASI	SKPD/LEMBAGA/KELP.PEMAMFAAT	KET		REALISASI (INVESTASI) Rp
					SUDAH	BELUM	
			dan alamnya di dunia.				
5	Kajian sistem manajemen pengembangan UMKM berbasis LERD (Local Economic Resources Development)	2012	- Dengan mempertimbangkan berbagai kekuatan dan kelemahan serta potensitas yang terdapat dikawasan atau wilayah pesisir di kabupaten Pesisir Selatan sebagaimana telah diuraikan pada Bab II, III, IV dan V sebelumnya, maka kedepan untuk percepatan pertumbuhan dan pengembangan “UMKM-berbasis LERD” di Kawasan atau Wilayah Pesisir di Kabupaten Pesisir Selatan diperlukan kerjasama secara “ <i>hand by hand</i> ” antara Pemerintah daerah Provinsi dengan Kabupaten secara bersama – sama untuk melakukan suatu gerakan membangun masyarakat nelayan dengan membentuk konsersium program dan konsersium instansi. Kabupaten Pesisir Selatan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari proses pembangunan Sumatera Barat. Justru itu, untuk membangun KASN, BP-KASN, PSV, dan P2T-UMKM diperlukan komitmen yang kuat dari pimpinan pemerintahan Provinsi dan Kabupaten Pesisir Selatan sebagai kunci sukses suatu proyek bantuan	Pemda Kabupaten Pesisir Selatan (tahap sosialisasi)		Perlu penelitian lanjutan.	Target 183.000.000 Realisasi 172.916.516

NO	JUDUL PENELITIAN	TAHUN	RINGKASAN REKOMENDASI	SKPD/LEMBAGA/KELP.PEMAMFAAT	KET		REALISASI (INVESTASI) Rp
					SUDAH	BELUM	
			atau pendampingan serta pembinaan. - Pengkajian yang lebih mendalam dan rinci masih diperlukan mengingat faktor-faktor lingkungan usaha P2T-UIKM, KASN, BP-KASN, PSV dalam ekonomi kawasan atau wilayah pedesaan dan pesisir terkait dengan banyak faktor, seperti: potensi lokal yang bisa dikembangkan menjadi unit-unit sentra pertumbuhan ekonomi baru; peran kelembagaan pemerintahan khususnya dalam pengelolaan sumber pendapatan daerah bagi kelanjutan pembangunan dengan prinsip-prinsip tata pemerintahan yang baik; faktor pendorong agar tumbuh keterkaitan investor untuk mengembangkan usahanya dengan jaminan berusaha yang baik dan kondusif; pemberian insentif kepada pelaku usaha yang mampu melakukan inovasi dan diservikasi produk dan memperluas lapangan kerja; kualitas dan kapasitas SDM baik dia sebagai pelaku usaha UIKM maupun sebagai aparaturn pemerintahan desa dan kabupaten; kemudahan akses informasi, pemasaran dan				

NO	JUDUL PENELITIAN	TAHUN	RINGKASAN REKOMENDASI	SKPD/LEMBAGA/KELP.PEMAMFAAT	KET		REALISASI (INVESTASI) Rp
					SUDAH	BELUM	
			permodalan;pembentukan kelembagaan keuangan desa dan wilayah pesisir,pendampingan dan bimbingan teknis terhadap masyarakat baik yang menyangkut dengan teknologi produk, kewirausahaan, manajemen produksi dan pemasaran maupun ,manajemen keuangan; pembangunan dan transformasi karakter individu dan “social cultural” masyarakat sehingga menjadi personil-personil yang lebih rasional dan “<i>business oriented</i>”. - Tahap sekarang penelitian hanya terbatas pada memperoleh gambaran tentang kondisi eksistensi ekonomi nelayan atau “<i>Economical Existing Condition of Nelayan</i>” dan lingkungan usaha di wilayah pesisir atau “<i>Business environment in coastal Areas</i>” di Kabupaten Pesisir Selatan. Dalam kontek ini, persoalan-persoalan dukungan Pemda Provinsi dan Pemda Kabupaten dikaji sedemikian rupa sehingga ditemukan bentuk koordinasi yang signifikan untuk diimplementasikan secara bersama-sama. Walaupun disadari bahwa menumbuh kembangkan UIKM				

NO	JUDUL PENELITIAN	TAHUN	RINGKASAN REKOMENDASI	SKPD/LEMBAGA/KELP.PEMAMFAAT	KET		REALISASI (INVESTASI) Rp
					SUDAH	BELUM	
			berbasis LERD dalam satu kawasan/wilayah adalah suatu pekerjaan yang panjang dan kompleks sifatnya mulai dari tahapan pendampingan sampai akhirnya UIKM yang bersangkutan betul-betul bisa <i>“take off”</i> atau berdiri sendiri <i>“competitive” and “bankable”</i>. - Mengingat pekerjaan tahap sekarang masih sangat terbatas, baru sampai pada menemukan kebijakan dan strategi yang relevan sehingga dokumen perencanaan ini belum bersifat menyeluruh dan tuntas sampai kepada <i>“action Plan”</i>. Pekerjaan penelitian ini baru meliputi;pengevaluasian, eksplorasi informasi dan konsep, pengkajian ide kelembagaan dan kemungkinan transformasi struktural, analisis kondisi sampai kepada melahirkan output dalam bentuk rekomendasi arahan kebijakan dan strategi. Masih terdapat 10 langkah lagi dari 13 langkah secara keseluruhan untuk merealisasikan arahan kebijakan dan strategi tersebut dan mewujudkannya dalam kehidupan nyata nelayan. Untuk itu maka penelitian yang lebih				

NO	JUDUL PENELITIAN	TAHUN	RINGKASAN REKOMENDASI	SKPD/LEMBAGA/KELP.PEMAMFAAT	KET		REALISASI (INVESTASI) Rp
					SUDAH	BELUM	
			tajam bersifat “<i>recearh action</i>” masih diperlukan sehingga bisa dibuat “<i>Action Plan</i>” dari masing-masing arahan kebijakan dan strategi kelembagaan yang direkomendasikan yaitu: KASN, BP KASN, PSV, P2T-UIKM. Dengan demikian ketidakpastian akan bisa diarahkan mendekati zero dan ide akan bisa menjadi benda nyata dan berguna untuk masyarakat banyak. - Untuk mengimplementasikan Hasil penelitian Tentang “Sistem Managemen Pengembangan UIKM Berbasis LERD di Kab.Pesisir Selatan” maka masih diperlukan tindak lanjut kegiatan dalam bentuk aksi tindak (<i>actions plan</i>) sebagaimana diuraikan pada Tabel IV.1 berikut yang terdiri dari kegiatan (2) s.d (7). Kegiatan – kegiatan yang dimaksud haruslah dilakukan secara terintegrasi satu sama lain dalam satu system manajemen yang lebih profesional.				
6	Studi efektifitas anggaran	2012	- Sebaiknya pemerintah Provinsi Sumatera Barat membuat kebijakan khusus terutama untuk mengatasi kelemahan dan keterbatasan daerah-daerah tertentu dalam meningkatkan	SKPD Provinsi (Dinas Kesehatan dan Pendidikan Kabupaten/Kota se Sumatera Barat).	✓		Target 178.600.000 Realisasi 170.636.900

NO	JUDUL PENELITIAN	TAHUN	RINGKASAN REKOMENDASI	SKPD/LEMBAGA/KELP.PEMAMFAAT	KET		REALISASI (INVESTASI) Rp
					SUDAH	BELUM	
			capaian target-target nasional. - Khusus pelayanan bidang kesehatan, Pemerintah Provinsi Sumatera Barat sebaiknya membuat kebijakan khususnya untuk mengatasi kendala pelayanan kesehatan bagi penderita penyakit TB BTA. - Peningkatan kapasitas perlu dilakukan terhadap staf yang bertanggungjawab menyusun LPPD di provinsi dan kota/kabupaten agar data-data yang dihasilkan dari LPPD tersebut dapat digunakan sebagai dasar penilaian kinerja dan juga dapat digunakan dalam perumusan kebijakan guna peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat. - Pimpinan lebih mengoptimalkan informasi capaian kinerja bawahan sebagai dasar dalam pengambilan keputusan, termasuk memberikan dan <i>punishment</i> terhadap karyawan sesuai dengan kinerja yang dihasilkannya.				
7	Pemacuan dan penguasaan Iptek di Sumatera Barat.	2012	- Dalam memberikan bantuan TTG, pihak terkait sebaiknya perlu berkoordinasi antar instansi maupun dengan masyarakat pengguna untuk mengetahui kebutuhan mereka, agar tujuan pemberian bantuan alat tersebut	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Barat	✓		Kegiatan kapasitas penelitian.

NO	JUDUL PENELITIAN	TAHUN	RINGKASAN REKOMENDASI	SKPD/LEMBAGA/KELP.PEMAMFAAT	KET		REALISASI (INVESTASI) Rp
					SUDAH	BELUM	
			dapat tercapai dengan optimal. - Sinergi antara instansi yang ada di pemerintahan pusat maupun SKPD yang ada di Provinsi dan kabupaten/kota perlu ditingkatkan dalam pengembangan dan penerapan TTG agar dapat meningkatkan efisiensi dan efektifitas program maupun kegiatan pengembangan TTG. - Pemerintah kabupaten/kota dapat memperluas akses bagi masyarakat untuk mendapatkan informasi TTG yang ada, seperti mengoptimalkan keberadaan Pos Pelayanan Teknologi (Posyantek) pada masing-masing kecamatan. - Upaya pengembangan seperti pendampingan , pelatihan dan bantuan pemasaran senantiasa perlu dilakukan oleh stakeholder agar TTG yang ada baik yang didapat masyarakat melalui swadaya maupun bantuan pemerintah, dapat digunakan masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan mereka. - Pengembangan bengkel yang mampu menghasilkan TTG di kabupaten/kota di Sumatera Barat perlu diperhatikan. Kemampuan dan kedekatan lokasi, dapat digunakan untuk mengatasi				

NO	JUDUL PENELITIAN	TAHUN	RINGKASAN REKOMENDASI	SKPD/LEMBAGA/KELP.PEMAMFAAT	KET		REALISASI (INVESTASI) Rp
					SUDAH	BELUM	
			kebutuhan lokal baik untuk menghasilkan alat, suku cadang, pemeliharaan dan perbaikan. - Penelitian ini perlu dilanjutkan dan dikembangkan oleh masing-masing Kabupaten/kota karena hasil yang didapat belum bisa menggambarkan secara lengkap data mengenai penerapan TTG yang ada di kabupaten/kota di Sumatera Barat karena adanya keterbatasan sumberdaya yang dimiliki.				
8	Kajian pengembangan Model Sistem Integrasi Angkutan Pemandu Moda	2013	- Pembukaan Rute Baru Angkutan Pemandu Moda yang berpotensi untuk dikembangkan antara: ▪ Rute BIM - Lubuk Alung - Sicincin - Padang Panjang - Bukittinggi - Baso - Payakumbuh PP dengan kebutuhan armada sebanyak 7 (tujuh) unit kendaraan. ▪ BIM – Simpang – Duku – By Pass – (Lubuk Minturun-Air pacah – Kuranji – Simpang Kataping) – Limau Manis. - Mengoperasikan Angkutan Pemandu Moda (Bus Bandara) dengan jenis kendaraan Bus medium AC super Eksekutif dengan 27 tempat duduk sesuai dengan preferensi penumpang.	- Masyarakat pengguna Jasa Layanan Angkutan Pemandu Moda rute BIM – Bukittinggi – payakumbuh, Bim –Padang via Bypass. - Dinas Perhubungan Provinsi (sebagai bahan masukan penyusunan Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 47 tahun 2014 tentang penyelenggaraan angkutan pemandu moda Bandar udara internasional minangkabau.	✓		Target 138.335.300 Realisasi 136.838.320

NO	JUDUL PENELITIAN	TAHUN	RINGKASAN REKOMENDASI	SKPD/LEMBAGA/KELP.PEMAMFAAT	KET		REALISASI (INVESTASI) Rp
					SUDAH	BELUM	
			- Jadwal keberangkatan dan kedatangan Angkutan Pemadu Moda (Bus Bandara) memiliki jadwal yang tetap dan teratur sehingga adanya kepastian jam pelayanan. - Mekanisme perizinan yang dilaksanakan adalah dengan melakukan pelelangan untuk memberikan kesempatan yang seluas-luasnya bagi perusahaan- perusahaan angkutan yang memenuhi persyaratan untuk ikut pelelangan. - Membuat Standar pelayanan Angkutan Pemadu Moda yang terkait dengan Standar Operasional Kendaraan dan Standar teknis Kendaraan. - Pemberian sanksi berupa pelarangan operasi selama periode waktu tertentu,sanksi denda, Pencabutan izin dan tender ulang (retendering) bagi perusahaan angkutan Pemadu Moda yang melanggar aturan yang telah ditetapkan dalam kontrak kerja. - Membuat Sistem Tiket Terintegrasi untuk menjamin terciptanya ketertiban dan kepastian pelayanan angkutan, - Penyediaan Fasilitas Informasi Layanan Kedatangan dan keberangkatan				

NO	JUDUL PENELITIAN	TAHUN	RINGKASAN REKOMENDASI	SKPD/LEMBAGA/KELP.PEMAMFAAT	KET		REALISASI (INVESTASI) Rp
					SUDAH	BELUM	
			Angkutan Pemadu Moda (Bus Bandara) baik di Bandara,tempat pemberhentian serta menyediakan informasi melalui fasilitas internet agar semua informasi yang berkaitan dengan Angkutan Pemadu Moda.				
9	Rencana Aksi Implementasi Pengembangan UMKM Berbasis LERD (Pembangunan Sumber-sumber Ekonomi Lokal)	2013	- Tahapan yang sangat kunci dan krusial selanjutnya adalah proses institusionalisasi dan penetapan status hukum KASPN dan BP-KASPN. Hal ini sangat berkaitan dengan keputusan politis (<i>political will</i>) dari PEMDA Provinsi Sumatera Barat bersama dengan DPRD dalam usaha peningkatan system manajemen ekonomi masyarakat nelayan di kawasan pesisir Kabupaten Pesisir Selatan. - Faktor kunci agar terimplementasinya secara penuh dan berkelanjutan kebijakan Transformasi Institusional dan Struktural beserta dengan program-program pilotasinya sangat tergantung dari nawaitu politis atau "<i>political will</i>" dari pemegang kebijakan pembangunan (Gubernur dan pemegang kebijakan legislasi (DPRD). - Untuk itu terdapat 2(dua) opsi yang	Pemda Propinsi dan Kabupaten Pesisir Selatan (tahap sosialisasi)	✓ (Sudah bisa dimanfaatkan,diperlukan komitmen pemda)		Target 155.143.800 Realiasi 151.881.120

NO	JUDUL PENELITIAN	TAHUN	RINGKASAN REKOMENDASI	SKPD/LEMBAGA/KELP.PEMAMFAAT	KET		REALISASI (INVESTASI) Rp
					SUDAH	BELUM	
			direkomendasikan: • Supaya Gubernur mengeluarkan Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang pembentukan/pendirian KASPN dan BP-KASPN, atau • DPRD menetapkan dan menyetujui PERDA untuk pembentukan/pendirian KASPN dan BP-KASN. - KASPN dan BP-KASPN yang secara institusi/kelembagaan jika sudah berbadan hukum yang jelas berarti terbentuknya AKTOR UTAMA sebagai penggerak rodanya proses manajemen Pengembangan Ekonomi Nelayan (prime mover) yang lebih produktif dan efisien. Kelembagaan seperti ini sangat penting untuk mengisi kelemahan yang selama ini terjadi. - Dengan mempertimbangkan prinsip mamfaat, efisiensi, dan efektifitas kerja maka KASPN dan BP-KASPN dapat diperluas rentang wilayah kerjanya (scope of works) sehingga meliputi semua wilayah pantai/pesisir Sumatera Barat dari Pasaman Barat sampai ke Pesisir Selatan, termasuk wilayah pantai pesisir kepulauan				

NO	JUDUL PENELITIAN	TAHUN	RINGKASAN REKOMENDASI	SKPD/LEMBAGA/KELP.PEMAMFAAT	KET		REALISASI (INVESTASI) Rp
					SUDAH	BELUM	
			mentawai. - Standard Operating procedure (SPO) dan pola pendampingan yang relevan akan ditentukan setelah ligetimasi terbentuknya BP-KASPN diakui dan disyahkan oleh yang berwenang (Gubernur dan DPRD). Hal ini penting mengingat yang berwenang menetapkan SOP dan pola Manajemen Pelaksanaan Pendampingan adalah BP-KASPN. - Untuk pelaksanaan implementasi sebuah program proyek pilotasi maka masing-masing program utama yang direkomendasikan pada penelitian ini harus disusun terlebih dahulu “Detail Engineering Design” (DED), dan selanjutnya melakukan studi kelayakan.				
10	Kajian Pertengahan Jalan Pelaksanaan RPJMD 2010-2015(Midterm Review RPJMD	2013	- Sebagai dasar perubahan perda RPJMD	Pemda Provinsi Sumatera Barat	✓		Target 210.230.000 Realisasi 208.865.920
11	Kajian pengembangan Strategi Pemberdayaan	2013	- Dalam upaya mengurangi resiko kematian ibu, khususnya didaerah terpencil, perlu dilakukan beberapa strategi terutama yang berkaitan	- Dinas kesehatan, Puskesmas Batu Banjang Kecamatan Tigo Lurah, Puskesmas Sirukam, Kecamatan Payung Sekaki,	✓		Target 142.837.900 Realisasi 142.158.680

NO	JUDUL PENELITIAN	TAHUN	RINGKASAN REKOMENDASI	SKPD/LEMBAGA/KELP.PEMAMFAAT	KET		REALISASI (INVESTASI) Rp
					SUDAH	BELUM	
	Masyarakat Berbasiskan Sosial budaya Lokal Dalam Upaya Mengurangi Resiko Kematian Ibu		dengan program-program pemberdayaan berbasis sosio budaya masyarakat lokal, yaitu: ▪ Peningkatan kapasitas masyarakat terkait perubahan perilaku kesehatan khususnya tentang kehamilan dan persalinan melalui peningkatan promosi dan pemberdayaan masyarakat, antara lain dengan memberikan pelatihan kepada kader, peningkatan peran tokoh masyarakat dan kapasitas organisasi masyarakat lokal, penyuluhan kepada ibu hamil dan keluarga tentang perencanaan persalinan serta kesigaaan dalam mengurangi resiko kematian ibu di daerah terpencil, ▪ Peningkatan kapasitas tenaga kesehatan melalui kegiatan pelatihan bagi tenaga kesehatan dan pelaksanaan kemitraan bidan dengan dukun beranak di daerah terpencil, sehingga dapat memberikan pelayanan kesehatan yang lebih baik; ▪ Peningkatan kapasitas kelembagaan system pelayanan kesehatan dengan peningkatan monitoring dan	Walinagari Batu Banjanjang. - 1). Kelompok ibu hamil dan punya anak balita, 2).Kelompok tokoh masyarakat yang terdiri dari Walinagari, Sekretaris, tokoh agama, tokoh adat, 3).Kelompok dari Organisasi Sosial Lokal/ Lembaga terkait (Lembaga Kekerabatan Adat MinangKabau/LKAM, PKK, Bundo Kandung, Karang Taruna, KUA), 4). Dukun beranak yang sudah bermitra dengan tenaga kesehatan serta, 5). Kader kesehatan. Beberapa rekomendasi hasil penelitian yang sudah ditinjaklanjuti dan dimamfaatkan antara lain adalah: - Sudah terbentuk struktur yang membawahi kegiatan promosi kesehatan yaitu seksi Promosi kesehatan Dinas kesehatan Kabupaten Solok. - Sudah terbentuk MoU antara bidan dan dukun beranak (sejumlah 12 orang) di Wilayah kerja Puskesmas Batu Bajanjang tanggal 8 Desember 2014.			

NO	JUDUL PENELITIAN	TAHUN	RINGKASAN REKOMENDASI	SKPD/LEMBAGA/KELP.PEMAMFAAT	KET		REALISASI (INVESTASI) Rp
					SUDAH	BELUM	
			evaluasi serta pembinaan dari Dinas Kesehatan Kabupaten secara berkala melalui kunjungan ke wilayah kerja Puskesmas, peningkatan pendampingan persalinan oleh tenaga kesehatan, dan peningkatan program pembiayaan jaminan pelayanan kesehatan ibu dan bersalin di daerah terpencil, ▪ Peningkatan kerjasama lintas sektor, antar lembaga dan stake holder terkait melalui sosialisasi dan advokasi lintas program dan lintas sektor dan kesepakatan dalam bentuk MoU lintas lembaga dan <i>stake holder</i> terkait. - Strategi dan program yang disusun diharapkan dapat dijadikan acuan bagi institusi/lembaga penanggung jawab dalam merencanakan, implementasi dan monitoring dan evaluasi upaya-upaya penurunan resiko kematian ibu di Sumatera Barat, khususnya di Kabupaten Solok dan daerah terpencil. - Perlu adanya peningkatan monitoring dan evaluasi dari Dinas Kesehatan secara berkala melalui kunjungan ke wilayah kerja Puskesmas, dan perlu	- Sudah ada peningkatan ketersediaan jam pelayanan yang sebelumnya dilakukan dua tau tiga kali dalam satu minggu menjadi setiap hari. - Sudah adanya bantuan kendaraan operasional (roda dua) untuk tenaga kesehatan. - Sudah ada peningkatan cakupan pertolongan persalinan dengan tenaga kesehatan di wilayah kerja Puskesmas Batu Bajaranjang dari yaitu kurang lebih 40% (tahun 2012) menjadi kurang lebih 50%. - Persentase cakupan kehamilan yang lengkap (k4) di Puskesmas Sirukam juga mengalami peningkatan, yaitu dari 4,75% tahun 2012 menjadi 62,8%. Sedangkan untuk persalinan dengan tenaga kesehatan juga mengalami peningkatan yaitu dari 48,2% menjadi 67,8%. - Puskesmas Sirukam sejak bulan Januari 2014 sudah berubah statusnya menjadi Puskesmas PONE (Pelayanan Obstetrik Neonatus Emergency Dasar), dan dengan kenaikan status ini			

NO	JUDUL PENELITIAN	TAHUN	RINGKASAN REKOMENDASI	SKPD/LEMBAGA/KELP.PEMAMFAAT	KET		REALISASI (INVESTASI) Rp
					SUDAH	BELUM	
			peningkatan koordinasi lintas program dan lintas sektor dalam implementasi program-program yang sudah disusun, dengan melaksanakan kegiatan-kegiatan.	diharapkan ke depannya bisa lebih meningkatkan pelayanan dan status kesehatan masyarakat.			
12	Kepuasan Masyarakat Terhadap Kinerja Pemerintah Provinsi Sumatera Barat.	2013	- Dari aspek urusan pendidikan kinerja pemerintah sudah baik dengan rerata indeks 63,3. Namun , perlu ada evaluasi kebijakan terhadap biaya pendidikan yang disorot masyarakat karena indeksnya rendah, yaitu 62,1. - Khusus masalah kesehatan, ini memang agak paradok. Sebab masyarakat memandang baik kinerja pemerintah ini terlihat indeksnya mencapai 64,7. Namun, jika disandingkan dengan data mid term review RPJMD, apalagi mengacu pada capaian terhadap MDGs yang kurang baik tentu menimbulkan pertanyaan. Oleh karenanya perlu dicarikan kebijakan yang sesuai sehingga pencapaiannya menjadi lebih baik. - Persepsi masyarakat terkait dengan pelayanan administrasi kependudukan masuk kategori baik dengan indeks 66,2. Walaupun begitu, perlu ada kebijakan yang dapat meningkatkan indeks pencapaian dari urusan ini.	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Barat dan kabupaten/kota, SKPD lingkup provinsi dan kab-kota, stakeholder terkait lainnya.	✓		Target 200.000.000 Realisasi 197.078.090

NO	JUDUL PENELITIAN	TAHUN	RINGKASAN REKOMENDASI	SKPD/LEMBAGA/KELP.PEMAMFAAT	KET		REALISASI (INVESTASI) Rp
					SUDAH	BELUM	
			- Khususnya infrastruktur mendapat rerata indeks 61.5 yang masuk kategori kurang baik. Ada beberapa infrastruktur yang disorot masyarakat yaitu, masalah jalan (59), jembatan (59,5), pengandaan air bersih (62,3), moda transportasi (58,5), listrik (61,6), perumahan (59,5) dan telekomunikasi (62). Namun, dari aspek lingkungan sudah dianggap baik oleh masyarakat dengan indeks capaian 64.7. - Keadaan ekonomi Sumatera Barat juga mendapat imbas dari keadaan ekonomi nasional. Rerata indeks capaian kinerja pemerintahan daerah Provinsi dari aspek ini hanya mencapai 53.4 yang masuk kategori kurang baik. Ada beberapa bidang kebijakan yang harus mendapat perhatian, yaitu menciptakan peluang usaha (54,7), harga barang kebutuhan pokok (53,5), daya beli masyarakat pokok (55,3), tingkat penghasilan rumah tangga (54,9), kemudahan mendapatkan kredit (53), dan kemudahan mendapatkan pekerjaan (48,8). - Kinerja pemerintah dari aspek pelayanan publik yang dilakukan				

NO	JUDUL PENELITIAN	TAHUN	RINGKASAN REKOMENDASI	SKPD/LEMBAGA/KELP.PEMAMFAAT	KET		REALISASI (INVESTASI) Rp
					SUDAH	BELUM	
			aparatur pemerintahan mencapai rerata indeks 59.8 sehingga termasuk kurang baik. Karenanya perlu ada kebijakan untuk memperbaiki kualitas pelayanan (60,6), ketersediaan sarana dan prasarana (61,6) dan profesionalitas (57,2) - Partisipasi masyarakat dalam pembangunan juga mendapat indeks 61.4 yang di kategorikan kurang baik. Karenanya perlu ada kebijakan pemerintah daerah yang dapat mendorong masyarakat lebih berpartisipasi dalam pembangunan. - Untuk bidang pertanian, menurut persepsi masyarakat indeks kinerja pemerintah provinsi masuk kategori kurang baik karena mencapai rerata 46. Ada beberapa bidang yang harus menjadi perhatian, yaitu ketersediaan pupuk dengan indeks 45,1, irigasi (44,5), ketersediaan benih (47,1), dan ketersediaan penyuluh pertanian (47,4). - Kondisi pangan daerah Sumatera Barat cukup baik menurut persepsi masyarakat dengan rerata indeks mencapai 62.6 persen. Walaupun begitu, dari aspek stabilitas harga				

NO	JUDUL PENELITIAN	TAHUN	RINGKASAN REKOMENDASI	SKPD/LEMBAGA/KELP.PEMAMFAAT	KET		REALISASI (INVESTASI) Rp
					SUDAH	BELUM	
			masuk kategori kurang baik dengan indeks 54.4. karenanya perlu ada kebijakan yang relevan untuk meningkatkan indeks pada aspek tersebut. - Kinerja pemerintah di bidang pemberdayaan masyarakat juga mendapat sorotan masyarakat. Indeks rerata bidang ini hanya 59 sehingga dikategorikan kurang baik. Ada beberapa bidang yang perlu mendapat intervensi kebijakan, yaitu pemberdayaan perempuan memperoleh indeks (55,8) perlindungan anak (55) dan gerakan pemberdayaan masyarakat (55,8). Aspek lain dari bidang ini yang mendapat indeks baik adalah pelaksanaan Program KB dan PNPM. - Penanganan masalah sosial juga menjadi masalah besar dalam kehidupan masyarakat. Ini memang menjadi persoalan ketika kewenangan melaksanakan urusan ini dibagi antara Provinsi dan Kabupaten/kota. Akibatnya penilaian masyarakat juga menjadi bias. Faktanya, masyarakat menilai bahwa munculnya berbagai masalah sosial ini adalah dampak				

NO	JUDUL PENELITIAN	TAHUN	RINGKASAN REKOMENDASI	SKPD/LEMBAGA/KELP.PEMAMFAAT	KET		REALISASI (INVESTASI) Rp
					SUDAH	BELUM	
			tidak terlaksananya fungsi pemerintahan Provinsi. Padahal yang bersentuhan langsung dengan aspek ini adalah pemerintah kabupaten/kota. Misalnya, indeks penanganan masalah prostitusi (37,4), gelandangan/anak jalanan (39,2), pengamen atau pengemis (39,1) dan HIV/AIDS (32,2) masuk pada kategori buruk. Sementara , pemberantasan kemiskinan masuk kategori kurang baik dengan indeks 56,4 dan kenakalan remaja 47,5 pada kategori kurang baik. - Dalam hal pelestarian budaya, pemerintahan Provinsi perlu meningkatkannya lagi karena rerata indeks urusan ini adalah 58 ada pada kategori kurang baik. Peningkatan kinerja pada bidang ini misalnya berhubungan langsung dengan pengembangan nilai ABS-SBK (58,3), ketersediaan sarana dan prasarana (57,8) dan pengembangan kesenian tradisional dengan indeks (58). - Kinerja di bidang pertahanan juga masuk kategori kurang baik dengan rerata indeks sebesar 45.6 Masalah pertahanan yang paling mendapat				

NO	JUDUL PENELITIAN	TAHUN	RINGKASAN REKOMENDASI	SKPD/LEMBAGA/KELP.PEMAMFAAT	KET		REALISASI (INVESTASI) Rp
					SUDAH	BELUM	
			perhatian masyarakat adalah penyelesaian konflik pertahanan yang memperoleh indeks terendah di bidang ini sebesar 44.9. - Patut di apresiasi masalah keamanan (69,9) dan ketertiban umum (67,6) sudah mencapai indeks yang baik. - Urusan lain yang juga terkait dengan kurang baiknya kinerja pemerintah Provinsi adalah kesiapsiagaan bencana yang hanya memperoleh indeks rerata 55.9. Masalah yang idealnya mendapat perhatian adalah sosialisasi masalah kebencanaan dengan indeks 57,7, fasilitas evaluasi dengan nilai indeks 55,6, mitigasi bencana (54,3) dan penanganan pasca bencana (55,9). - Kinerja pemerintah Provinsi terkait kebebasan yang dirasakan masyarakat masuk pada kategori baik dengan indeks rerata 71.3. - Indeks penanganan korupsi juga buruk ketika dinilai masyarakat dengan indeks 37.4. - Terkait dengan harapan masyarakat terhadap peningkatan kesejahteraan mereka, maka ada beberapa prioritas yang dapat dilakukan oleh pemerintah berdasarkan kebutuhan masyarakat.				

NO	JUDUL PENELITIAN	TAHUN	RINGKASAN REKOMENDASI	SKPD/LEMBAGA/KELP.PEMAMFAAT	KET		REALISASI (INVESTASI) Rp
					SUDAH	BELUM	
			Misalnya, dibidang pendidikan, yaitu memprioritaskan sekolah gratis (26,34 persen), kurikulum dan mutu pendidikan (11,55 persen) dan kualitas SDM/Profesionalitas guru (11,87 persen). Bidang ekonomi, yaitu peningkatan lapangan kerja (31,18 persen), stabilitas harga (31,18 persen) dan bantuan modal usaha /kredit (29,67 persen). Bidang pemerintahan perlu di prioritaskan peningkatan kualitas pelayanan (26,03 persen), pembangunan nagari (21,42 persen) dan pembarantasan korupsi (19,98 persen). Bidang sosial budaya perlu menjadi perhatian pemenuhan kebutuhan masyarakat terkait dengan pelestarian adat dan budaya (28,70 persen), menjujung nilai ABS-SBK (16,85 persen) dan acara rutin seni dan budaya (9,60 persen). Dibidang kesehatan adalah pengobatan gratis (termasuk obat dan operasi) (13,73 persen), kelengkapan alat dan sarana kesehatan (11,36 persen) dan jaminan kesehatan untuk orang miskin (4,27 persen). Terakhir adalah infrastruktur yang memenuhi harapan masyarakat, terutama perbaikan jalan (68,53				

NO	JUDUL PENELITIAN	TAHUN	RINGKASAN REKOMENDASI	SKPD/LEMBAGA/KELP.PEMAMFAAT	KET		REALISASI (INVESTASI) Rp
					SUDAH	BELUM	
			persen), perbaikan listrik (7,39 persen) dan ketersediaan listrik (7,01 persen).				
13	Strategi Pengembangan Pengelolaan Sampah Kota Bukittinggi.	2014	- Dalam upaya pengurangan volume sampah dari sumbernya, pengelolaan sampah yang tidak bertumpu pada pola kumpul, angkut dan buang, merupakan salah satu strategi yang berdampak berkurangnya volume sampah dari sumbernya. Beberapa strategi lainnya yang perlu dilakukan yaitu: a) Meningkatkan pemahaman masyarakat akan upaya 3R b) Mengembangkan dan menerapkan system insentif dan diinsentif dalam pelaksanaan pengelolaan sampah 3R. c) Melaksanakan system pengawasan dan sanksi hukum secara konsisten. - Dalam upaya peningkatan cakupan pelayanan dan kualitas system pengelolaan sampah dimana saat ini tingkat pelayanan untuk sumber sampah rumah tangga, hanya 55,12%, sedangkan tingkat pelayanan untuk sumber sampah pasar dan pertokoan berkisar 20,98% dan 13,04%, rendahnya tingkat pelayanan menyebabkan sampah tidak terangkut	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Barat.	✓		Kegiatan kapasitas peneliti.

NO	JUDUL PENELITIAN	TAHUN	RINGKASAN REKOMENDASI	SKPD/LEMBAGA/KELP.PEMAMFAAT	KET		REALISASI (INVESTASI) Rp
					SUDAH	BELUM	
			ke TPA, sehingga sebagian masyarakat menangani sampahnya dengan cara membuang sampah ke sungai, dibakar dan ditimbun. Beberapa strategi yang perlu dilakukan yaitu: a) Optimalisasi pemamfaatan prasarana dan sarana pelayanan persampahan. b) Meningkatkan cakupan pelayanan secara terencana dan berkeadilan c) Meningkatkan kapasitas sarana persampahan sesuai sasaran pelayanan. - Dalam upaya peningkatan peran serta masyarakat untuk pengurangan sampah pada sumber sampah, ada beberapa strategi yang dapat dilakukan yaitu: a) Pengembangan pendidikan lingkungan yang dimulai pada anak usia dini. b) Penyuluhan/Sosialisasi pengelola sampah 3R kepada masyarakat c) Pengembangan system insentif dan diinsentif d) Peningkatan partisipasi masyarakat/swasta dalam penyusunan perencanaan				

NO	JUDUL PENELITIAN	TAHUN	RINGKASAN REKOMENDASI	SKPD/LEMBAGA/KELP.PEMAMFAAT	KET		REALISASI (INVESTASI) Rp
					SUDAH	BELUM	
			pengelolaan sampah.				
14	Strategi Pengelolaan Agribisnis Gambir Ramah Lingkungan Melalui Pendekatan Sistem Modelling Di Sumatera Barat.	2014	- Untuk meningkatkan produktivitas, efisiensi usaha dan kelestarian lingkungan kawasan kebun gambir maka dianjurkan kepada petani untuk menerapkan teknologi utama seperti varietas unggul, perbaikan pemupukan (kimia + kompos daun gambir yang diperkaya), pengaturan/penyiangan kebun agar produktifitas meningkat menuju potensi hasil 2.0 t/ha/thn. Dampaknya adalah petani tidak perlu mengarap luas tanaman gambir 2-4 ha/kk, cukup 1-2 ha saja, tetapi hasilnya cukup tinggi. - Meningkatkan nilai tambah produk dengan mengembangkan usaha industri olahan gambir lokal (tinta, penyamakan kulit, kosmetika dan minuman, dan lain-lainya sehingga akan mengurangi ketergantungan petani terhadap pasar luar negeri. - Melakukan penyuluhan yang berkelanjutan pada petani gambir dalam hal menghasilkan produktivitas tinggi dan produk gambir yang mengandung katechin tinggi (>50%). - Sosialisasi dan implementasi produk olahan gambir (tinta gambir dan penyamak kulit) guna mendorong permintaan gambir dalam negeri. - Mendorong inovasi teknologi pengolahan bahan baku gambir yang	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Barat.	✓		Target 80.000.000 Realisasi 79.503.796

NO	JUDUL PENELITIAN	TAHUN	RINGKASAN REKOMENDASI	SKPD/LEMBAGA/KELP.PEMAMFAAT	KET		REALISASI (INVESTASI) Rp
					SUDAH	BELUM	
			telah dihasilkan untuk masuk ke dunia industri dengan terlebih dahulu dipatenkan. - Perlu kajian kelembagaan pasar yang dapat menguatkan posisi tawar petani, diantaranya : resi gudang, perusda, dan gebu minang, dan lain-lain dalam hal pemasaran gambir dan industri pengolahan produk hilir.				
15	Background Studi RPJMD Provinsi Sumatera Barat 2015-2020	2014		Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Barat.	✓		Target 425.312.100 Realisasi 391.353.208
16	Arah Kebijakan Transportasi di Sumatera Barat	2014		Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Barat.			Kegiatan kapasitas penelitian
17	Kajian Pengembangan Strategi Dalam Rangka Penurunan Angka Kematian Bayi Berbasis Sosial Budaya Di Provinsi Sumatera Barat.	2015	- Dalam rangka penurunan angka kematian bayi di Sumatera Barat dilakukan beberapa strategi terutama yang berkaitan dengan program-program dan kegiatan yang lebih didasarkan pada pendekatan sosial budaya yaitu: a) Strategi peningkatan ketersediaan layanan dan mutu keberlangsungan pelayanan serta keterjangkauan pelayanan kesehatan ibu dan anak (terutama di daerah terpencil), yang dilaksanakan melalui kegiatan peningkatan ketersediaan layanan dan kualitas keberlangsungan layanan	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Barat.	✓		Kegiatan kapasitas penelitian

NO	JUDUL PENELITIAN	TAHUN	RINGKASAN REKOMENDASI	SKPD/LEMBAGA/KELP.PEMAMFAAT	KET		REALISASI (INVESTASI) Rp
					SUDAH	BELUM	
			serta keterjangkauan pelayanan kesehatan ibu, anak dan remaja (terutama di daerah terpencil), dan peningkatan layanan gizi masyarakat. b) Strategi penguatan kapasitas sumberdaya kesehatan melalui peningkatan jumlah dan kualitas tenaga bidan yang mempunyai kompetensi dan memahami kondisi sosial budaya lokal serta pemerataan pendistribusian tenaga kesehatan, yang dilaksanakan melalui kegiatan standarisasi, sertifikasi dan pendidikan yang berkelanjutan bagi bidan dan tenaga kesehatan lainnya, peningkatan pengetahuan petugas kesehatan tentang kondisi sosial budaya lokal melalui pemetaan atau analisis situasi kesehatan, peningkatan kualitas dan jumlah tenaga penyuluh kesehatan/nakes lainnya dalam hal promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat, peningkatan distribusi tenaga yang terintegrasi, mengikat dan sesuai dengan lokal spesifik. c) Strategi peningkatan pelayanan kesehatan ibu dan bayi lebih menitik beratkan pelayanan kesehatan promotif preventif, yang dilaksanakan				

NO	JUDUL PENELITIAN	TAHUN	RINGKASAN REKOMENDASI	SKPD/LEMBAGA/KELP.PEMAMFAAT	KET		REALISASI (INVESTASI) Rp
					SUDAH	BELUM	
			melalui kegiatan optimalisasi penyuluhan untuk meningkatkan pengetahuan dan kesadaran masyarakat (perempuan dan keluarga) terhadap pemamfaatan layanan kesehatan ibu dan anak, intensifikasi UKS dan menekankan pada promotif kesehatan yang sejalan dengan perubahan dinamis sosial budaya masyarakat, dan pengembangan media untuk penyampaian pesan dan informasi kesehatan melalui kegiatan tradisi dan budaya masyarakat. d) Strategi optimalisasi pemberdayaan masyarakat melalui penguatan kelembagaan organisasi sosial lokal dan kemitraan serta pengembangan kegiatan Upaya Kesehatan Berbasis Masyarakat (UKBM) dalam rangka peningkatan kesehatan ibu dan bayi, yang dilaksanakan melalui kegiatan peningkatan pemberdayaan perempuan/keluarga & masyarakat melalui organisasi sosial lokal (UKBM), pengembangan posyandu remaja terutama pelayanan kesehatan promotif dan preventif kepada remaja, optimalisasi pelaksanaan perilaku hidup bersih dan sehat, peningkatan				

NO	JUDUL PENELITIAN	TAHUN	RINGKASAN REKOMENDASI	SKPD/LEMBAGA/KELP.PEMAMFAAT	KET		REALISASI (INVESTASI) Rp
					SUDAH	BELUM	
			peran kader dan tokoh masyarakat dalam upaya penurunan AKB, optimalisasi kemitraan bidan dan dukun beranak, dan optimalisasi pelaksanaan ASI Eksekutif. e) Strategi optimalisasi Jaminan Pembiayaan Kesehatan, yang dilaksanakan melalui kegiatan peningkatan pembiayaan kesehatan bagi kelompok miskin, optimalisasi integritas Jaminan Kesehatan Nasional yang tinggi dalam pelayanan neonatal, perinatal dan bayi, peningkatan koordinasi Pemda dan pemerintah Pusat untuk optimalisasi kriteria/standar yang akan diberikan dalam penentuan penerima bantuan iuran. - Strategi dan program yang disusun diharapkan bisa menjadi pedoman dalam rencana pembangunan bidang kesehatan pada tahun berikutnya, khususnya dalam rangka penurunan Angka Kematian Bayi. Rekomendasi diharapkan juga bisa dimamfaatkan oleh Kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Barat dalam rangka penurunan Angka Kematian Bayi. - Perlu adanya peningkatan koordinasi				

NO	JUDUL PENELITIAN	TAHUN	RINGKASAN REKOMENDASI	SKPD/LEMBAGA/KELP.PEMAMFAAT	KET		REALISASI (INVESTASI) Rp
					SUDAH	BELUM	
			lintas program dan lintas sektor dalam implementasi program-program yang sudah disusun, dengan melaksanakan kegiatan-kegiatan secara terpadu. - Dalam rangka penurunan Angka Kematian Bayi di Provinsi Sumatera Barat perlu adanya komitmen dan dukungan dari pengambil kebijakan untuk mengalokasikan anggaran di jalur sektor kesehatan.				
18	Gran Design Pembangunan “Technopark” Sumatera Barat.	2015	- Dengan Grand Design ini, dapat dijadikan sebagai arahan kebijakan dalam membangun kerjasama yang lebih produktif antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat, antara Pemerintah Provinsi dengan PEMDA kabupaten/kota se wilayah Provinsi Sumatera Barat dan dengan wilayah sekitarnya didalam operasionalisasi <i>Technopark</i> untuk menumbuh kembangkan industri dan bisnis produk-produk yang dihasilkan dari komoditas unggulan. - Dengan Grand Design ini, diharapkan sebagai panduan sehingga memudahkan proses bagi “Policy Makers” di Sumatera Barat untuk mendirikan dan mengoperasikan	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Barat.		✓	Kegiatan koordinasi pembangunan Technopark Sumatera Barat.

NO	JUDUL PENELITIAN	TAHUN	RINGKASAN REKOMENDASI	SKPD/LEMBAGA/KELP.PEMAMFAAT	KET		REALISASI (INVESTASI) Rp
					SUDAH	BELUM	
			kelembagaan TECHNOPARK. Dengan demikian dalam waktu dekat sekurang-kurangnya Sumatera Barat sudah dapat memiliki sebuah Technopark di tingkat Provinsi yang cukup besar dan luas lingkup kerjanya. Technopark ditingkat Provinsi berperan sebagai Technopark induk atau <i>"holding company"</i> bagi Technopark-Technopark yang berada di wilayah kota dan kabupaten. - TECHNOPARK Sumatera Barat akan lebih relevan dan realitis serta mungkin untuk diwujudkan dengan baik, akan bisa bekerja lebih profesional dan tidak secara terus menerus membebani APBD dan APBN bilamana dibentuk atau didirikan dalam bentuk badan hukum sebagai Perusahaan ini akan mampu menjadi <i>"income creator and seeker"</i> bagi Pendapatan Asli daerah (PAD) - Standard Operating Procedures (SOP) sangat diperlukan, idealnya masing-masing rencana program dan kegiatan TECHNOPARK harus memiliki SOP yang jelas dan tegas untuk menghindari resiko kegagalan dan pemborosan tenaga dan pendanaan.				

NO	JUDUL PENELITIAN	TAHUN	RINGKASAN REKOMENDASI	SKPD/LEMBAGA/KELP.PEMAMFAAT	KET		REALISASI (INVESTASI) Rp
					SUDAH	BELUM	
			Justru itu harus segera disusun begitu PT. TECHNOPARK Sumatera Barat di deklerasikan berdiri oleh pemegang saham pendiri (Gubernur dan Bupati/Wako se wilayah Provinsi Sumatera Barat dan Anggota Dewan Riset Daerah Sumatera Barat, BUMD dan swasta lainnya yang bisa dan bersedia diikut sertakan).				